

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KONDISI SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT
(Suatu Studi Di Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepulauan Talaud)**

**SYLFIA EVA TEGI
ARIE JUNUS RORONG
ALDEN LALOMA**

ABSTRACT: To maximize the benefits of decentralization in accordance with the mandate of the Act. No. 32 of 2004 so the arrangement of the New Autonomous Region became one of the important issues that are still focusing of the Government. PP. 129 of 2000 about the Formation Requirements and Criteria for Expansion, Elimination, and Regional Merger later replaced by Regulation 78 of 2007 about Procedures for the Establishment, Abolition, and Region Merging.

The efforts regional division is seen as a breakthrough to accelerate development through improving the quality of and easy access to the public service for the people. Considering the regional autonomy objective is to improve the welfare of the community, get closer to public services, and strengthen regional competitiveness. This research is intended to answer the question about what is extending impact of division policy on the social economic conditions of the society in sub district Gemeh of Talaud islands.

This research used a descriptive-Evaluative, with a quantitative approach. Informants in this research are 15 people that were taken by proportion 5 villages: 1 rural village is in the center of town, each village in north, south, east, and west. Instrument this research is using data collection with interview. Analyze the data with quantitative analysis.

The results showed: 1) Impact of the policy of regional expansion program, 2) implementation of the policy of regional expansion program. Based on the this research results conclusion that: division policy districts Talaud islands in the form of implementation programs for infrastructure development, community empowerment and community service, especially in the sub district Gemeh of Talaud islands.

Based on the results of this research, the conclusion are: 1). To improve the social economic conditions of rural communities, particularly in Sub district Gemeh, it would require concerted effort of the government together with other stakeholders to work together to improve the development of rural community infrastructure, empowering people and providing excellent service to community.2) considering the division policy had a positive effect and significantly to the improvement of social economic conditions of the people, then the government needs to deal with programs that touch directly to the community that needs as an integral part of regional divisions implemented destination itself.

Keywords: Impact of Regional Expansion Policy

PENDAHULUAN.

Untuk memaksimalkan manfaat desentralisasi sesuai dengan amanah UU. Nomor 32 Tahun 2004, maka penataan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi salah satu isu penting yang sampai sekarang masih menjadi fokus Pemerintah. Penataan DOB sampai saat ini masih sangat identik dengan pemekaran wilayah, belum ada yang

mengarah pada penghapusan dan penggabungan wilayah seperti diatur dalam PP. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang kemudian diganti dengan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat. Pembentukan DOB menimbulkan banyak masalah dan justru menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan; mengapa demikian? Penelitian ini tertarik untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi pasca pemekaran wilayah di Daerah Otonom Baru, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan contoh kasus Kecamatan Gemeh sebagai lokasi penelitian ini.

Kabupaten Kepulauan Talaud resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 2002, dengan seorang pejabat negara Drs. F. Tumimbang, sebagai pejabat bupati kabupaten Kepulauan Talaud. Undang-undang No. 8 tahun 2002 telah menetapkan sebagai daerah otonom, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 Tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu setiap tanggal 2 Juli. Kabupaten kepulauan talaud adalah salah satu kabupaten provinsi Sulawesi utara ibu kota melonguane kabupaten berasal dari pemekaran kabupaten kepulauan sangihe dan talaud pada tahun 2002 . kabupaten talaud terletak disebelah utara pulau sulawesi . wilayah ini adalah kawasan apling utara di Indonesia timur berbatasan langsung dengan daerah Davao Del sur, Filipina di sebelah utara.

Pada saat dimekarkan jumlah penduduk kabupaten kepulauan talaud sebanyak 91.067 jiwa. Kabupaten talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km² dan luas wilayah daratan 1.251,02. Kondisi kabupaten kepulauan talaud termasuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia dan masih terisolir karena berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi social budaya, perhubungan, telekomunikasi, dan informasi serta pertahanan dan keamanan.

Secara administrative kabupaten kepulauan talaud merupakan bagian dari provinsi Sulawesi utara. Gambaran singkat kondisi kabupaten kepulauan talaud sebagaimana telah dikemukakan diatas ada indikasi kuat bahwa kebijakan pemekaran wilayah kabupaten kepulauan talaud sejak lebih kurang 12 tahun silam hingga sekarang belum memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten kepulauan talaud dilihat dari kondisi social ekonomi mereka. Realitas ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Suatu Studi di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini Adalah:

1. Sejauhmana dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Apakah ada perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gemeh antara kondisi awal (sebelum pemekaran) dengan kondisi sekarang (Setelah pemekaran) wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud ?

Tujuan yang ingin capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gemeh antara kondisi awal (sebelum pemekaran) dengan kondisi sekarang (Setelah pemekaran) wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-evaluatif, dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, antara kondisi awal (sebelum pemekaran) dengan kondisi sekarang (setelah pemekaran), khususnya di Kecamatan Gemeh.

1. Kebijakan pemekaran wilayah kabupaten kepulauan talaud, khususnya di kecamatan gemeh sebagai variable independen atau variable predicator yang diberi symbol X
2. kondisi social ekonomi masyarakat kecamatan gemeh sebagai dampak pemekaran wilayah kabupaten kepulauan talaud sebagai variable dependen atau variable respon yang di beri symbol Y.

Fokus dalam penelitian ini adalah Kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya di Kecamatan Gemeh sebagai variabel independen atau variabel prediktor yang diberi simbol X. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat kecamatan Gemeh sebagai dampak dari pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai variabel dependen atau variabel respons yang diberi simbol Y. Adapun definisi konsep dan ruusan operasional tersebut maka dapat di kemukakan sebagai berikut: Kebijakan pemekaran wilayah didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat daerah.

wilayah di definisikan sebagai upaya pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah seperti pembangunan, pemberdayaa, dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat daerah.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Nawawi, 1995 : 141). Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah semua karakteristik yang terkait dengan dampak kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, khususnya di Kecamatan Gemeh. Sampel adalah wakil populasi, jika populasi penelitian di anggap homogen, maka sampelnya cukup di ambil 5% saja, akan tetapi jika populasinya heterogen, maka jumlah sampelnya harus dinaikkan lebih besar (Erna Widodo dan Mukhtar 2000 : 94-95).

Untuk penelitian ini, maka yang akan dijadikan sebagai sampel desa sebanyak 5 (lima) dari 15 (lima belas) desa ditarik secara purposive, yakni 1 desa berada di pusat kota (pusat pemerintahan), dan masing-masing 1 desa berada di sebelah utara, selatan, timur dan sebelah barat dari pusat pemerintahan. Setiap desa ditetapkan sebanyak 15 orang responden, yang terdiri dari :

- 5 orang unsur pemerintah desa
- 3 orang unsur kelembagaan desa
- 2 orang unsur tokoh masyarakat petani
- 2 orang unsur pelaku usaha 2 orang unsur tokoh masyarakat agama dan adat.

Dengan demikian, jumlah responden yang berasal dari 5 desa sampel sebanyak 75 orang, kemudian ditambah 5 orang dari unsur pemerintah Kecamatan Gemeh, sehingga total responden adalah sebanyak 80 orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

1. Pengumpulan data primer : data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus (Surachmat, 1980 : 163). Data primer dalam penelitian ini di jaring dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) dan dibantu dengan panduan wawancara (*interview guide*)
2. Pengumpulan data sekunder : Data sekunder adalah yang lebih dulu di kumpulkan oleh orang lain di luar penyelidikan sendiri (Surachmat, 1980 : 163). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data statistik, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa serta laporan pelaksana program pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, baik sebelum maupun sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan lokus Kecamatan Gemeh.

Mengacu pada permasalahan dan hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka teknik-teknik analisis data

yang relevan digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi atau analisis persentase. Khusus untuk mengevaluasi dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, digunakan desain evaluatif yang dilakukan dengan cara mengukur tingkat perkembangan/peningkatan atau perubahan indikator-indikator sosial-ekonomi masyarakat antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah dengan lokus Kecamatan Gemeh.
- ✓ Untuk menguji hipotesis nomor 1, tentang pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) digunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menyelesaikan persamaan regresi/prediksi : $\hat{Y} = a + b X$
 - Melakukan uji model regresi melalui ANOVA
 - Melakukan uji koefisien regresi melalui statistik-t (test)
 - ✓ Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan koefisien determinasi (r^2) yang diperoleh dari hasil analisis korelasi *product*

moment, melalui penyelesaian rumus yang dimodifikasi oleh Sudjana (1983), sebagai berikut :

$r =$

$$\frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

- ✓ Untuk menguji hipotesis nomor 2, tentang perbedaan dan atau (persamaan) tingkat kondisi sosial ekonomi masyarakat antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud digunakan uji beda dengan menerapkan statistik-t. Rumus yang digunakan adalah Paired t-test :

$$t = \frac{\sum d_i}{\sqrt{n\sum d_i^2 - (\sum d_i)^2/n-1}}$$

dimana :

d = Selisih nilai (skor) variabel kondisi sosial ekonomi antara sesudah dan sebelum pemekaran wilayah

n = besar sampel

Analisis dapat dilakukan secara terpisah antara kondisi sosial masyarakat (Y_1) dan kondisi ekonomi masyarakat (Y_2)

- ✓ Kriteria penerimaan hipotesis : Hipotesis dapat diterima atau dinyatakan signifikan pada taraf uji 1 % atau $\alpha : 0,01$.
- ✓ Semua analisa data di bantu dengan program SPSS for windows versi 20 melalui perangkat komputer.

PEMBAHASAN

1. Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa hipotesis 1, yang menyatakan bahwa “Kebijakan pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Talaud, khususnya Kecamatan Gemeh”, telah teruji keberlakuannya secara empiris dengan sangat meyakinkan melalui analisis regresi sederhana dan korelasi *product moment*.

Berdasarkan hasil analisis korelasi *product moment* diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,655 dan koefisien determinasi, diperoleh (r^2) sebesar 0,429. Hal ini bermakna bahwa kuatnya keterkaitan antar variabel kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diperoleh sebesar 65,5 % dan kuatnya daya dukung atau daya penentu kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, diperoleh sebesar 42,9 %. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pengaruh atau dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar

42,9 %, sedangkan sisanya sebesar 57,1 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan lebih lanjut tentang adanya fakta empirik bahwa antara kebijakan pemekaran wilayah yang melahirkan daerah otonomi baru (DOB) memiliki karakteristik perkembangan yang linear atau sejajar dengan pertumbuhan atau perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendiami DOB tersebut.

2. Perbedaan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Antara Kondisi Awal (Sebelum Pemekaran) Dan Kondisi Sekarang (Setelah Pemekaran)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat perbedaan tingkat kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan Gemeh antara kondisi awal (sebelum pemekaran) dengan kondisi sekarang (setelah pemekaran) wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud”, dapat diterima secara meyakinkan pada tingkat kepercayaan 99 %. Hal ini bermakna bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Gemeh jauh lebih baik setelah pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dibanding sebelum pemekaran. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa rata-rata kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pemekaran diperoleh sebesar 46 atau dalam skala ideal pengukuran sebesar 0.766 atau 76,6 %, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum pemekaran rata-rata hanya sebesar 28,6 atau dalam skala ideal pengukuran diperoleh sebesar 0,477 atau 47,7 % saja, sehingga terjadi perbedaan yang sangat nyata, yakni sekitar 28.9 %. Hal ini bermakna bahwa terjadi kenaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Gemeh pasca implementasi pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 28,9 %.

Realitas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat desa di Kecamatan Gemeh untuk hidup lebih baik sebagai dampak positif dari penerapan kebijakan pemekaran wilayah sebagai daerah otonomi baru (DOB) mendorong masyarakat untuk lebih produktif sehingga mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga mereka. Kesadaran untuk membangun daerah disektor sosial ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran pemekaran wilayah itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten kepulauan Talaud dalam bentuk implementasi program-program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Gemeh, berada pada kategori “sedang” cenderung “tinggi”.
2. Kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten kepulauan Talaud berdampak positif dan signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, khususnya di kecamatan Gemeh. Naik-turunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Gemeh dapat dijelaskan melalui variasi keberhasilan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan Gemeh pasca pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, jauh lebih baik (tinggi) dibanding sebelum pemekaran wilayah.

Dengan demikian, semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah teruji keberlakuannya secara empiris sekaligus dapat menjustifikasi teori-teori maupun konsep-konsep yang mendasarinya.

Saran

Mengacu pada beberapa temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mengajukan beberapa saran sebagai solusi terbaik dalam memecakan masalah yang dihadapi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan keberhasilan pembangunan desa. Saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Gemeh, maka diperlukan upaya konkrit dari pemerintah bersama stakeholders lainnya untuk bersama-sama masyarakat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, memberdayakan masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mengingat kebijakan pemekaran wilayah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka pemerintah perlu menangani program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan

dilaksanakannya pemekaran wilayah itu sendiri.

3. Merekomendasikan kepada peneliti atau mahasiswa yang akan menyusun skripsi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengambil tema pemekaran wilayah pada kabupaten lain untuk mengkaji lebih lanjut tentang keberhasilan pemekaran wilayah sebagai DOB dalam mensejahterakan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 1996, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, Alfabeta, Bandung.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2002. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Avyrouz. Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.

Sumber lain :

- Undang-undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, Dharma Bakti, Jakarta.